

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA METRO DALAM PENCAPAIAN VISI KOTA METRO (IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 24 TAHUN 2016)

Dewi Oktarina

Magister Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Lampung
Jalan Sumantri Brodjonegoro No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia
Korespondensi: dewioktarina33@gmail.com

Received: 06/04/2020 | Revised: 20/05/2020 | Accepted: 21/05/2020

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Main Tasks and Functions in the Field of Animal Husbandry and Health and UPT-UPT Department of Food Security, Agriculture and Fisheries in Achieving the Vision of Metro City (Implementation of Regional Regulation Number 24 of 2016). This research uses descriptive research type with qualitative data, data collection techniques in this study include interviews, documentation and observation, then the data is processed, so as to produce data in the form of an explanation of the Effectiveness of the Implementation of Main Tasks and Functions. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of basic tasks and functions in Metro City's Department of Food Security, Agriculture and Fisheries are: 1. Strategic plans as a reference in determining program priorities and activity indicators that are adjusted to the main tasks and functions 2. Responsible for implementing programs and activities with the main tasks and functions 3. Some Principal Tasks and Functions have yet to be carried out due to budget constraints. 4. Limited Human Resources is the cause of the mismatch in the placement of personnel. 5. The main tasks and functions which are incorrectly placed, then an evaluation is needed to improve the translation of the main tasks and functions. 6. The amount of the budget is not in accordance with the main tasks and functions so that there are some main tasks and functions that cannot be implemented. 7. The implementation of basic tasks and functions have not been carried out effectively due to the limitations of Human Resources and the budget they have.

Keywords: Effectiveness of Duties and Functions, Department of Food Security

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UPT-UPT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam Pencapaian Visi Kota Metro (Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan data kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi, kemudian data tersebut diolah, sehingga menghasilkan data yang berupa uraian penjelasan tentang Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro yaitu : 1. Rencana strategis sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan indikator kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi 2. Penanggungjawab pelaksana program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi 3. Beberapa Tugas Pokok dan Fungsi belum dapat terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi penyebab ketidaksesuaian dalam penempatan personil. 5. Tugas pokok dan fungsi yang dalam penempatannya kurang tepat, maka diperlukan adanya evaluasi untuk perbaikan penjabaran tugas pokok dan fungsi. 6. Jumlah anggaran belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga ada beberapa Tupoksi yang belum dapat dilaksanakan. 7. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum dilaksanakan secara efektif dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran yang dimiliki.

Kata kunci: Efektifitas Tugas dan Fungsi, Dinas Ketahanan Pangan

PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kota Metro menerbitkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Metro. Dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut maka ada beberapa perubahan nomenklatur dinas yang ada di Kota Metro. Salah satu di antaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya, yaitu Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

Restrukturisasi organisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk harapan dan keinginan pengefektifan fungsi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan harapan fungsi pemerintahan akan semakin efektif dan efisien. Sedarmayanti (2010) menjelaskan bahwa penataan kelembagaan penyelenggaraan pemerintah daerah hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Perubahan dan penataan kelembagaan sistem pemerintahan dan organisasi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kemampuan beradaptasi dan berinovasi, sehingga tidak hanya memperbaiki efektivitas yang ada, namun juga menciptakan kelembagaan yang mampu memperbaiki efektivitas bila lingkungannya berubah.

Menurut Robbins (1995) tugas pokok dan fungsi organisasi sangat berkaitan erat dengan efektivitas kerja organisasi, keefektifan didefinisikan sejauh mana sebuah organisasi dapat mewujudkan tujuan-tujuannya. Tugas pokok dan fungsi yang telah dirancang dengan benar tersebut secara jelas termuat dalam sebuah uraian pekerjaan (*job description*) yang merupakan kumpulan informasi mengenai pekerjaan atau garis besar mengenai apa saja kewajiban, tanggung jawab dan wewenang yang dipegang serta harus dilaksanakan oleh para pegawai.

Penyusunan uraian pekerjaan dan pembagian tugas dengan tepat dan jelas membuat para pegawai dapat memahami tugas dengan baik dan tidak mengalami hambatan dalam pekerjaan. Setiap pegawai juga memiliki batasan kerja tersendiri sehingga tidak saling mencampuri tugas satu sama lain, tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, serta komunikasi terbentuk dengan baik karena adanya hubungan kerjasama yang baik antar pegawai. Menurut Aulia dan Sahuri (2013) tupoksi dapat dipengaruhi oleh pembagian kerja, pendelegasian wewenang, pembagian departemen dan rentang kendali.

Namun pada kenyataannya terdapat kurang meratanya jumlah tugas pokok dan fungsi di masing-masing jabatan, masih ada beberapa tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan serta terjadinya tumpang tindih tugas di beberapa jabatan yang berakibat pada kebingungan pemangku jabatan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dalam hal ini peneliti membatasi pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UPT-UPT dibawahnya, dan hal-hal yang terkait dalam pelaksanaannya baik itu mengenai pendukung dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tupoksi tersebut yang secara langsung berpengaruh pada upaya pencapaian tujuan organisasi.

METODE

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang valid yaitu melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Alat pengumpulan data atau instrument penelitian adalah peneliti sendiri yang langsung terjun ke lapangan (Moleong, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian data primer adalah wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berupa data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi lainnya.

Teknik analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Kerja Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam rangka mendukung tercapainya visi Kota Metro, maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah menyusun rencana strategis Tahun 2016-2021. Adapun penyusunan Rencana Strategis dijadikan acuan penyusunan rencana kerja bagian dan bidang dalam menentukan prioritas program dan indikator kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya

Terkait dengan target & sasaran pembangunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka untuk mempermudah koordinasi dan evaluasi capaian kinerja maka ditentukan penanggung jawab pencapaian target, yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama 3 (tiga) UPTD bekerja sama sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan menginventarisir sasaran mana yang menjadi kewenangan bidang kemudian menentukan penanggung jawab dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat terlepas dari dukungan anggaran. Sebagaimana yang terjadi pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, masih terdapat tugas pokok dan fungsi yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala oleh kurangnya anggaran. Dampaknya ada beberapa Tupoksi yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan faktor anggaran, terdapat ketidakadilan baik dari segi jumlah kegiatan maupun besaran anggaran yang diberikan kepada masing-masing jabatan/tupoksi.

Pada sisi sumber daya manusia, ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang cukup sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan, namun pada data yang peneliti dapat masih terjadi ketidakmerataan jumlah sumber daya manusia di masing-masing seksi hal ini terjadi karena sistem penempatan pegawai yang masih belum berdasarkan latar belakang pendidikan, hal ini dipengaruhi karena adanya keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki.

Pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang dalam penempatannya kurang tepat, yaitu terdapat pengulangan item tugas dan fungsi yang seharusnya dapat digabung menjadi satu, sehingga diperlukan adanya evaluasi untuk perbaikan penjabaran tugas pokok dan fungsi di masing-masing jabatan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini juga tidak terlepas dari dukungan anggaran, yang terjadi pada tahun 2019 anggaran lebih banyak diberikan kepada Seksi sedangkan di UPTD hanya biaya operasional/rutin. Sehingga pelaksanaan Tupoksi sering terhambat, maka diperlukan evaluasi dalam teknis penganggaran yang harus mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya. beberapa tupoksi yang tumpang tindih dan penempatannya kurang tepat. Hal ini dikarenakan Tupoksi yang terlalu banyak, dengan ditemukannya pengulangan item tugas dan fungsi yang seharusnya dapat digabung atau disederhanakan menjadi 1 (satu) tupoksi saja. Dengan mengedepankan prinsip mempermudah jalur birokrasi, efektivitas dan efisiensi serta tidak berbelit-belit.

Di bagian akhir, realisasi capaian target dan sasaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan beberapa kendala, yaitu faktor internal adanya kekurangan jumlah sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dan keterbatasan jumlah anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor eksternal adalah sedikitnya jumlah pemotong yang berasal dari Kota Metro dan rendahnya daya beli masyarakat membeli daging.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro untuk mencapai titik efektivitas pelaksanaan tupoksi antara lain:

- a. Penyusunan jadwal kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama seluruh bidang mengingat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dan keterbatasan SDM serta sarana prasarana yang dimiliki, untuk menghindari adanya kepadatan jadwal dibulan-bulan akhir tahun anggaran.
- b. Melakukan evaluasi penataan ulang Tupoksi agar tidak terjadi tumpang tindih dan pengulangan Tupoksi dengan inti pokok yang sama.

- c. Beberapa Tupoksi yang belum bisa terlaksana agar dapat dicarikan solusi bersama baik itu dengan pemerataan anggaran atau menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu.
- d. Kendala keterbatasan jumlah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Metro untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan agar disiasati dengan melaksanakan kegiatan prioritas yang berkaitan langsung mendukung terwujudnya visi Kota Metro.
- e. Tujuan dan sasaran yang belum tercapai perlu dilakukan pembinaan lebih intensif kepada masyarakat untuk menyukai produk asal hewan baik berupa bahan baku maupun olahan sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat.
- f. Kekurangan SDM yang kompeten serta kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dapat diatasi dengan meningkatkan skill individu dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.
- g. Keterbatasan anggaran jangan dijadikan sebagai kendala utama, lakukan pembinaan kepada masyarakat dalam hal ini pengusaha, pedagang dan pengolah produk asal hewan agar memiliki kesadaran sendiri memeriksakan produknya, sehingga pemerintah dalam bekerja tidak harus selalu terkendala oleh kekurangan anggaran.

PENUTUP

Kebijakan restrukturisasi di Kota Metro khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin jelas. Dikarenakan yang selama ini terjadi organisasi terlalu gemuk, banyak terjadi tumpah tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara satu dinas dengan badan dan kantor lainnya. Apabila ditelusuri lebih jauh tugas dan kewenangan yang diemban sebenarnya sama.

Pasca restrukturisasi dilakukan, tujuan-tujuan organisasi menjadi semakin terarah, salah satunya disebabkan karena tugas dan kewenangan unit tersebut semakin jelas. Dengan kewenangan dan tugas yang jelas dan terbagi rata di masing-masing bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tersebut, maka tujuan-tujuan organisasi akan dapat tercapai secara optimal. Berkaitan dengan anggaran, secara garis besar dapat dikurangi karena berkurangnya jumlah OPD yang secara langsung berkurang pula jumlah jabatan struktural.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, F. & Sahuri, C. (2013). Pelaksanaan Tupoksi Organisasi Kelurahan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(1), 1-6.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbins, P. S. (1995). *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi* (Edisi Ketiga). Jakarta: Arcan.
- Sedarmayanti. (2010). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Subagia, I. W. & Wiratma, I. G. L. (Oktober 2009). Penilaian Kemampuan Individu Melaksanakan Tupoksi dalam Organisasi Masyarakat Tradisional Bali Ditinjau dari Konsep "Tri Kaya Parisudha". *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 42(3), 160-169.